



Industri pariwisata global tidak hancur – hanya tertahan pekerjaan dan mata pencaharian buruh hotel & pariwisatalah yang menghadapi kehancuran

Dr Hidayat Greenfield
Sekertaris Regional IUF Asia/Pasifik
22 April 2020

Tidak diragukan lagi bahwa pandemi COVID-19 telah memukul industri pariwisata dengan keras. Dengan penerbangan dibatalkan dan *lockdown* negara-negara, kedatangan wisatawan terhenti, dan tingkat hunian hotel mencapai nol. Di sebagian besar negara di Asia, penutupan sementara hotel akan diperpanjang hingga bulan Juni. Tetapi apa yang membuat pandemi COVID-19 *krisis* COVID-19 adalah kegagalan pemerintah dan pengusaha untuk mengurangi dampak terburuk dari darurat kesehatan masyarakat ini. Jelas bahwa kegagalan terbesar berakar pada dekade privatisasi dan komersialisasi perawatan kesehatan masyarakat, membuat kita memiliki sistem perawatan kesehatan masyarakat yang kekurangan dana, kekurangan tenaga, kekurangan peralatan dan tenaga kesehatan masyarakat yang bekerja berlebihan. Bagi jutaan buruh pariwisata yang menghadapi pengangguran dan kemiskinan, pandemi menjadi krisis ketika perusahaan-perusahaan yang memimpin industri yang bernilai triliunan dolar ini (pendapatan pariwisata internasional pada tahun 2018 adalah US\$ 1,45 triliun), memutuskan untuk mengalihkan biaya pandemi COVID-19 ke buruh.

Ya, tingkat hunian nol. Ya, hotel ditutup sementara. Tetapi tanggapan pengusaha di industri perhotelan memiliki dampak jangka panjang pada buruh dan keluarga mereka. PHK bersifat permanen. Pemotongan upah selama penutupan hotel sementara tidak sementara - upah yang hilang tidak akan dilunasi ketika wisatawan kembali. Upah hilang begitu saja. Tampaknya juga hilang, akumulasi pendapatan selama bertahun-tahun dari tingkat hunian yang tinggi dan industri pariwisata yang berkembang pesat. Kemana semua uang itu pergi? Mengapa buruh diharapkan menanggung biaya penutupan COVID-19?

Di Asia Tenggara, seperti di tempat lain, pembayaran Sebagian upah selama penutupan hotel sementara disajikan oleh pengusaha sebagai tindakan kedermawanan - bukti bahwa kami melawan COVID-19 bersama. Di Indonesia, CEO konglomerat media, *real estate* dan jasa keuangan milik keluarga dipuji atas perannya dalam “perang total melawan virus korona”, mengizinkan rumah sakit swasta untuk membuka rumah sakit sementara di salah satu *mall*-nya. (Tidak disebutkan fakta bahwa konglomerat yang sama memiliki rumah sakit swasta yang dibantunya dan surat kabar yang melaporkan kedermawanan ini). Konglomerat yang sama ini juga memiliki jaringan hotel yang ditutup menggunakan alasan *force majeure*. Penyalahgunaan *force majeure* ini memungkinkan perusahaan untuk keluar dari kewajiban hukum dan tanggung jawab pengusaha. Hotel bintang lima di Jakarta dan lainnya di Bandung ditutup dan semua buruh dipaksa untuk mengambil 'pensiun dini.' Dengan kata lain, pemutusan hubungan kerja.

Beberapa jaringan hotel internasional yang beroperasi di Indonesia membayar buruh hanya 50% dari upah pokok selama penutupan sementara. Dalam setiap pengumuman dan setiap surat kepada karyawan, ini disajikan sebagai kedermawanan: setengah dari upah Anda lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi kenyataannya adalah upah buruh hotel sangat bergantung pada redistribusi uang servis. Untuk sebagian besar buruh hotel, upah pokok setara dengan upah minimum: 50% dari upah pokok adalah 50% dari upah minimum.

Di resor mewah Aman, para buruh dirumahkan dengan 50% dari upah pokok mereka. Namun upah pokok setara dengan upah minimum Rp2.042.000 [120,30 Euro; US\$ 130,50] per bulan. Jadi sekarang mereka berada pada Rp1.021.000 per bulan, atau hanya US\$ 2,50 [Euro 2,31] per hari.

Dalam surat kepada manajemen pada tanggal 10 April, serikat buruh di Hotel Amanjiwo Borobudur menyatakan pemahaman penuh tentang situasi yang dihadapi oleh hotel, tetapi juga memberi tahu bahwa setelah 10 hingga 20 tahun masa kerja, anggota serikat buruh tidak dapat memahami mengapa pelayanan baik dan kontribusi mereka terhadap pendapatan tahunan yang tinggi di masa lalu tidak berarti apa-apa sekarang. Serikat buruh juga mengangkat kekhawatiran tentang upah yang jauh di bawah upah hidup:

Buruh yang dirumahkan sementara hanya menerima 50% dari upah setiap bulan dari 1 April 2020 hingga 31 Mei 2020, di mana rata-rata yang diterima oleh buruh adalah Rp1.000.000 (US\$ 61) per bulan. Ini tentu saja merupakan beban yang sangat sulit untuk kami tanggung. Upah di bawah upah minimum dan tidak memungkinkan standar hidup yang layak. Ini tidak akan cukup untuk menutupi biaya hidup pasangan dan anak-anak kami setiap hari dalam beberapa bulan mendatang, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini.

Serikat buruh menambahkan bahwa keputusan manajemen untuk membayar hanya 50% dari Tunjangan Hari Raya (THR) selama bulan Ramadan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak hukum mereka: "... Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak kami dan sudah dianggarkan oleh perusahaan tahun lalu (2019). Karena itu, itu juga harus dibayar penuh." Perusahaan menolak.

Bahkan di mana 50% dari upah pokok berarti upah miskin di bawah minimum, pengusaha masih akan menahan pembayaran. Di Courtyard by Marriott di Bandung, setelah negosiasi yang sangat sulit, serikat buruh mencapai kesepakatan dengan manajemen pada tanggal 1 April untuk menerima 50% upah dan 100% Tunjangan Hari Raya (THR) yang diwajibkan secara hukum. Dua minggu kemudian pemilik properti membatalkan perjanjian, menyatakan bahwa tidak ada upah yang dibayarkan sama sekali pada bulan Mei atau Juni.

Apa yang membuat negosiasi apa pun tentang upah menjadi sulit adalah iklim ketakutan dan ketidakpastian yang dipupuk oleh manajemen. Manajemen menggunakan ketakutan dan ketidakpastian ini untuk memaksa buruh menyetujui pemotongan upah dan menyerahkan hak-

hak mereka, menambah kecemasan COVID-19 yang sudah ada. Salah satu hasilnya adalah meningkatnya insiden tekanan mental sebagai penyakit di tempat kerja, bahkan ketika buruh dikeluarkan dari tempat kerja.

Bagian dari tekanan mental yang diciptakan manajemen adalah mengkomunikasikan pemotongan upah dan pemberhentian sementara sebagai masalah *pribadi*. AccorHotels, misalnya, mengirimkan surat kepada karyawan yang menjelaskan tentang penutupan hotel, penggunaan cuti tahunan dan cuti tidak berbayar wajib sebagai masalah pribadi. Di resor mewah Accor Sofitel Nusa Dua Beach Resort di Bali, para buruh diberitahu bahwa perusahaan akan "*membantu Anda lebih lanjut dalam mengatur kehidupan pribadi Anda selama beberapa bulan mendatang*" dan menambahkan: "*Kami menyarankan Anda tetap memperhatikan pengeluaran Anda.*" Ini seolah-olah pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap pariwisata adalah pengalaman pribadi, berdasarkan pilihan pribadi. Seolah-olah keputusan apakah Anda terjatuh ke dalam kemiskinan tergantung pada Anda – perhatikan saja pengeluaran Anda! Apa yang disebut sebagai pilihan ini disajikan oleh manajemen Accor Sofitel dalam "formulir pilihan" dengan hanya dua opsi:

Tulis X di salah satu kolom pilihan

- () *Ya, saya setuju untuk menerima tawaran di atas dan memutuskan untuk mengambil cuti tidak berbayar sampai pemberitahuan lebih lanjut atas kemauan saya sendiri. Saya setuju untuk kembali bekerja saat perusahaan kembali membutuhkan. Saya tanda tangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.*
- () *Tidak, saya tidak menerima tawaran di atas, saya akan menanggung konsekuensi dari penyesuaian gaji di masa mendatang.*

Tanpa paksaan. Namun segala sesuatu tentang pilihan opsi ini adalah paksaan. Tidak ada upah tanpa batasan waktu atau mengambil kesempatan dan tidak mendapatkan apa pun di masa depan. Tidak ada opsi ketiga yang mempertimbangkan akumulasi laba selama bertahun-tahun dan bisnis yang sukses yang hanya sementara - selama 3 sampai 6 bulan - tidak memiliki pendapatan. *Hak untuk menerima upah minimum yang dari grup hotel terbesar di dunia bukanlah suatu opsi.*

Dalam "formulir pilihan" yang sama, manajemen Sofitel menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab yang akan diambil perusahaan kepada para buruh dalam pandemi global ini adalah "*Special token of care for our Sofitel family*" sebesar Rp2.000.000 atau US\$ 128 [Euro 118]. Tidak bulanan. Hanya sekali. Dan hanya itu. Sisanya adalah cuti tidak berbayar tanpa batas waktu.

Ada konsekuensi penting lain dari tidak dibayarnya atau sengaja membayar buruh hotel di bawah upah minimum. Perusahaan-perusahaan hotel terbesar di dunia dapat berkontribusi untuk

melawan penyebaran COVID-19 dengan memastikan bahwa para buruh di hotel-hotel yang ditutup dapat tetap di rumah dengan upah pokok penuh. Perusahaan-perusahaan ini memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka mengurangi buruh menjadi upah miskin atau tidak ada upah sama sekali. Buruh hotel sekarang berada di antara buruh miskin di jalanan mencari pekerjaan di ekonomi informal. Mereka harus pergi keluar dan mencari pekerjaan dalam bentuk apa pun untuk bertahan hidup di tengah-tengah ketakutan, ketidakpastian dan kecemasan krisis COVID-19.